

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PROGAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA

Bonifasius Efsiko Nugroho

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
bonifasiusnugroho16040674024@mhs.unesa.ac.id

Galih W. Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan tanah sebagai sumber pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi semakin terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peran pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*literatur review*) dimana di dalam perpustakaan mengkaji literatur yang merupakan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum, peran pemerintah telah berhasil melaksanakan program rehabilitasi sosial RTLH kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat dari lima aspek yaitu stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Maksud dan tujuan sasaran program sudah tepat sasaran karena istilah yang disebutkan dalam Perwali adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial RTLH secara fisik dapat tinggal di rumah yang lebih baik dan layak huni. **Kata Kunci:** Peran pemerintah, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, kota Surabaya.

Abstract

The country of Indonesia is ranked fourth with the most populous race in the world, has a total population of 269 million people. This can be seen in the population density that occurs in big cities, one of which is the city of Surabaya, where every year the population in the city of Surabaya is increasing. Along with the rapid population growth, the supply of land as a source of housing development which is the need of each individual becomes increasingly limited. The purpose of this research is to examine to provide a clear and comprehensive picture of the role of the Surabaya city government in improving the quality of life through the social rehabilitation program for unfit for habitation. The focus of this research is the role of the government, namely as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementation. The research method used is the descriptive qualitative literature approach (literature review) in which the library examines the literature which is the primary source of previous journals. Data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study can be concluded that in general, the role of the government has succeeded in implementing the RTLH social rehabilitation program in the city of Surabaya with good results seen from five aspects, namely stabilizers, innovators, modernizers, pioneers, and implementation. The aims and objectives of the program targets are right on target because the term mentioned in the Perwali is that poor people who have houses that are not suitable for habitation through the RTLH social rehabilitation program can physically live in better and livable houses.

Keywords: *The role of government, a social rehabilitation program for unfit for habitation, the city of Surabaya*

PENDAHULUAN

Penduduk adalah salah satu kunci dari berlangsungnya pembangunan nasional pada suatu negara, sebab pertarungan peningkatan kependudukan sebagai suatu yang esensial bagi pembangunan yang berkelanjutan. Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan tanah sebagai sumber pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi semakin terbatas.

Pembangunan dengan model tingkat menggunakan sedikit lahan menjadi solusi nya seperti contoh Apartement yang banyak ditemui di kota-kota besar seperti Surabaya. Apartement membutuhkan lahan yang tidak terlalu besar namun memiliki daya tampung yang cukup banyak, dilengkapi dengan fasilitas modern dan keamanan yang cukup terjamin. Selain Apartement terdapat juga perumahan yang tersedia di kota Surabaya, karena keterbatasan lahan menyebabkan harga perumahan di kota Surabaya terus meningkat sehingga sebagian masyarakat tidak mampu untuk memiliki. Daya beli masyarakat ekonomi rendah untuk memiliki hunian yang layak masih belum mampu, karena harga yang ditawarkan cukup tinggi. Pemerintah memberikan solusi untuk mereka yang kurang mampu agar tinggal di RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) dengan biaya yang relatif murah. Namun kenyataannya Rusunawa pemerintah kota Surabaya tidak semua memiliki keadaan yang baik.

Salah satu Rusunawa yang kian memprihatinkan dan memiliki banyak kerusakan yakni Rusunawa Sombo dan Penjaringan. Banyaknya kerusakan tersebut berakibat pada keadaan yang memaksa warga untuk memilih memperbaiki sendiri rumah tinggal mereka. Warga penghuni Rusunawa memilih untuk kembali ke rumah tinggal mereka, meskipun memiliki keadaan yang jauh lebih memprihatinkan. Mereka beranggapan bahwa lebih baik jika uang yang mereka gunakan untuk membayar iuran, digunakan untuk kebutuhan lainnya dan memilih kembali ke rumah tinggal mereka. Namun disisi lain hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya jumlah rumah tinggal tidak layak huni yang menuntut pemerintah kota Surabaya untuk membuat program lain demi menurunkan angka kemiskinan. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah kota Surabaya yakni Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Salah satu alasan dibentuknya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, karena jumlah dan

presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama. Perlu adanya sebuah program untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian Fauziah (2020), menyatakan bahwa kebijakan pembangunan perumahan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan adalah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Berikut ini disampaikan data jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia menurut Provinsi tahun 2018-2019.

Tabel 1.

Data jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia menurut Provinsi tahun 2018-2019.

No	Provinsi	2018	2019	Presentase %
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)		
1	Jawa Timur	4.292,15	4.112,25	-0,48%
2	Jawa Tengah	3.867,42	3.743,23	-0,39%
3	Jawa Barat	3.539,40	3.399,16	-0,34%
4	Sumantra Utara	1.291,99	1.282,04	-0,11%
5	Lampung	1.091,60	1.063,66	-0,39%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia , 2019.

Data diatas artinya data yang mendeskripsikan jumlah kemiskinan yang terdapat di 5 Provinsi pada Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia berada pada Provinsi Jawa Timur. Sebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tadi, maka fenomena permukiman atau daerah kumuh pada beberapa Kota pada Provinsi Jawa Timur ini dapat dengan mudah di jumpai di hampir seluruh kawasan Provinsi Jawa Timur.

Disamping itu pula upaya yang terus di berikan pemerintah kepada warga adalah dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana dasar pemukiman bagi rakyat miskin serta berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air higienis di pemukiman rawan air, penataan serta rehabilitasi permukiman kumuh/tak layak huni, serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan tempat tinggal bersubsidi/KPR.

Sesuai data berasal Kementrian PUPR, salah satu Provinsi pada Pulau Jawa yg memiliki tingkat kepadatan serta jumlah tempat kumuh terbanyak pada Provinsi Jawa Timur merupakan Kota Surabaya. Berdasarkan Bappenas, Surabaya ialah salah satu dari empat sentra pertumbuhan primer pada Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Akibat tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa akan mengakibatkan padat penduduk serta permukiman kumuh. Salah satu kota yang memiliki

kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada pulau Jawa ialah kota Surabaya.

Tabel 2.

Data jumlah kawasan kumuh Provinsi tahun 2019

Provinsi	Kategori Kawasan Kumuh		
	Ringan	Sedang	Berat
Jawa Tengah	495	179	52
Banten	368	281	70
Jawa Barat	38	124	77
Jawa Timur	157	65	24
Aceh	90	59	18
Sulawesi Selatan	50	117	120
Sumatra Utara	11	72	95
Nusa Tenggara	30	40	91

Sumber: Data Warehouse Cipta Karya ,Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019

Persebaran permukiman kumuh ditentukan oleh angka kemiskinan dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi di Kota Surabaya. Permukiman kumuh tadi dihuni oleh warga yang memiliki ekonomi rendah atau miskin. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program. Rehabilitasi Sosial wilayah Kumuh di kota Surabaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut diketahui dari bentuk partisipasi masyarakat dan tingkatan partisipasi rakyat yang masih rendah (Tiarawati, 2020). Sehingga, buat mengatasi agar program tersebut berjalan sesuai rencana pentingnya dicermati dari beberapa aspek agar mendapatkan solusi yang tepat. Penanganan permukiman kumuh adalah salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemkot Surabaya.

Persoalan kawasan kumuh di wilayah metropolitan diidentikkan dengan persoalan kemiskinan. Hal ini juga dirasakan oleh Pemkot Surabaya yang terlihat dengan tingginya angka kemiskinan di Kota Surabaya, meski dalam kurun waktu 5 tahun mengalami perubahan dan penurunan.

Tabel 3.

Data angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya tahun 2015 – 2019 (dalam ribuan).

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2015	165.72	5,82%
2016	161.01	5,63%
2017	154.71	5,39%
2018	140.81	4,88%
2019	130.55	4,51%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019.

Berdasarkan data angka kemiskinan kota Surabaya tahun 2019 yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 130.550 jiwa dengan angka kemiskinan 4,51 %. Disisi lain, pertumbuhan daerah kumuh ditandai dengan munculnya daerah kumuh yang tidak layak huni semakin tinggi. Hal tersebut ditandai lingkungan sisa pemukiman kumuh sebesar 43,46 ha dari total luas kota Surabaya sebesar 32.519 ha, berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019. Pemerintah kota Surabaya sudah berupaya agar kawasan kumuh yang berada di kota Surabaya semakin sedikit agar terciptanya kawasan yang sehat bagi keberlangsungan hidup masyarakat kota Surabaya. Surabaya juga banyak memiliki lahan yang dapat berpotensi sebagai kawasan hijau dan juga dapat menjadi icon Surabaya sebagai salah satu tempat bersejarah. Upaya pemerintah terus dilakukan kawasan kumuh dapat hilang sehingga menjadi kawasan yang layak huni.

Pelaksanaan strategi ini diakui telah melalui beberapa tahapan yang juga diarahkan untuk mendukung program 100-0-100 publik, khususnya akses 100% ke air minum yang layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% masuk ke sterilisasi yang layak. Seperti meningkatkan sarana dan prasarana dasar penting untuk permukiman, termasuk jalan lingkungan, sanitasi, drainase, dan meningkatkan perbaikan lingkungan. Meskipun telah dilakukan secara berlanjut, namun pencapaian upaya pengelolaan kawasan kumuh pada umumnya dipengaruhi oleh kemajuan faktor lain, misalnya perluasan wilayah huni atau permukiman kumuh di wilayah metropolitan, salah satunya di antaranya dipicu oleh laju urbanisasi yang tinggi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya Sesuai peraturan Walikota Surabaya No.6 tahun 2019 pemerintah kota Surabaya berupaya melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan program dari pemerintah kota Surabaya yang dapat merasakan program tersebut merupakan kategori MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah) dari daftar list Pemkot Surabaya, atau setidaknya yang memiliki surat keterangan tidak mampu. Dengan adanya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kota Surabaya ini dapat menjadikan lingkungan di kota Surabaya ini terdapat peningkatan kondisi di lingkungan permukiman dan sosial masyarakat dengan pelayanan dan penanganan yang tepat baik dalam perbaikan fisik lingkungan maupun sosial ekonomi di lingkungan masyarakat di perkampungan.

Peningkatan kualitas hidup warga miskin yang awalnya mempunyai tempat tinggal kumuh berubah menjadi lebih layak. Sehingga warga yang mempunyai tempat tinggal yang kumuh serta tidak layak huni kemudian diperbaiki serta direnovasi melalui program

atau kegiatan tersebut, demi memperoleh manfaat sosial dan ekonomi serta warga yang bersangkutan menjadi percaya diri dalam bersosialisasi pada warga disekitar. Dengan demikian, ancaman yang mungkin saja terjadi nantinya jika rumah yang rusak atau tidak layak huni menjadi ambruk yang sewaktu-saat kapan saja, banjir, serta masalah sanitasi dan sirkulasi udara yang seharusnya memenuhi standart kesehatan dapat ditangani dengan lebih optimal. Dengan adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Kota Surabaya yang ingin memberikan bantuan bagi masyarakat miskin agar mampu menaikkan kualitas hidup yang lebih layak serta lebih sehat. Terkait dengan jumlah target bantuan yang berasal dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Kota Surabaya pun semakin diperbanyak pada setiap tahunnya.

Tabel 4.

Data jumlah unit rumah/KK sasaran rehabsos rutilahu di Kota Surabaya tahun 2014 – 2019.

Tahun	Tahun	Peningkatan dan penurunan (%)
2014	602 Rumah/KK	-
2015	723 Rumah/KK	20%
2016	749 Rumah/KK	4%
2017	1442 Rumah/KK	92%
2018	1012 Rumah/KK	-30%
2019	1100 Rumah/KK	10%

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2019

Peningkatan serta penurunan jumlah sasaran rumah pada program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut terjadi pada tahun 2014 hingga 2019 namun, ada hal yang mengganjal, yaitu dengan adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang artinya wadah bantuan bagi masyarakat Surabaya buat memperbaiki rumahnya yang mempunyai kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni tersebut masih mengalami fluktuasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roebyantho & Unayah, (2015) memberikan gambaran bahwa karakteristik target penerima program tidak seluruhnya mengacu dari pedoman pelaksanaan Kementerian Sosial RI, tetapi disesuaikan oleh kebijakan Pemerintah Daerah pada penanganan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni diawali dengan pembentukan grup (10 orang). Selanjutnya grup tersebut mempunyai pengurus, pendamping. Pendamping dan ketua kelompok membuka rekening. Penyusunan perencanaan dilakukan oleh semua anggota dengan pendamping.

Dari data jumlah penerima sasaran program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1012 rumah saja, padahal di tahun 2017 yaitu 1442 rumah dengan persentase -30%, sedangkan ditahun 2019 meningkat menjadi 1100 rumah dengan presentase 10%, sehingga terlihat keseriusan Pemerintah kota Surabaya terutama Dinas Sosial Kota Surabaya dalam menangani program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, menurut data Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2019

Tujuan kegiatan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan menaikkan kualitas rumah fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat serta aman. Dinas Sosial kota Surabaya menjalankan program ini dengan dibantu masyarakat dengan cara musyawarah dengan melibatkan lembaga masyarakat disetiap kelurahan yang ada, lembaga tersebut yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan UPKM (Unit Pemberdayaan Keluarga Miskin) dan juga melibatkan RT/RW setempat untuk menentukan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan ini.

Program ini hadir untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat ekonomi lemah di kota Surabaya, khususnya para masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tentang peran pemerintah kota Surabaya dalam mengupayakan keberlangsungan hidup yang layak untuk masyarakat ekonomi rendah, dan peneliti tertarik untuk meneliti peran pemerintah kota Surabaya terutama Dinas Sosial Kota Surabaya dan juga dampak apa yang diterima oleh masyarakat yang menerima program tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, dimana di dalam perpustakaan mengkaji literatur yang merupakan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu dan di dukung dengan wawancara ataupun oleh buku - buku yang ada. Jurnal yang digunakan sebagai sumber literatur dalam penelitian ini adalah jurnal yang telah terbit di jurnal nasional yaitu :

Tabel 5.

Daftar jurnal yang dianalisis

Penulis	Tahun	Jurnal
Atmoko R P.	2013	Jurnal Administrasi Publik (UB)
Ike A.	2013	Kebijakan dan Manajemen Publik (UNAIR)

Fatwa	2019	<i>JA Political science</i> (General)
Heru E.	2015	Publika (UNESA)
Ishak I & Indayu R.	2014	Jurnal <i>Online</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Riau)
Nurjiansyah W.D	2016	Kebijakan dan Manajemen Publik (UNAIR)
Nafisa R & Soesilowati E	2020	Economics Development Analysis Journal (UNNES)
Roebyantho H & Unayah N	2015	Sosio Konsepsia
Ulu V & Sholichah N	2020	Jurnal Agama & Perubahan Sosial (IAIN KEDIRI)
Wicaksono K W.	2018	Jurnal Manajemen Pelayanan Publik (UNPAD)

Sumber: Diolah peneliti, (202).

Menurut Sugiyono (2013), literatur merupakan catatan peristiwa lalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental lain. Tujuan dari menggunakan pendekatan ini mengungkap fakta di lapangan berdasarkan data yang didapat dan dituangkan berupa data tertulis serta dikaitkan dengan teori yang digunakan (Anggraeni 2013). Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang “Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni”. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah menurut Siagian (2000 : 142-150), yang terdiri atas lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana.

Stabilisator adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Dan Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan

berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bias diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan studi literatur atau studi pustaka. Studi literatur atau studi pustaka yang dimaksud ialah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Sehingga pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang artinya peneliti tidak mendapatkan data atau informasi secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode menurut Miles dan Huberman (2012), meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Surabaya pada fenomena yang ditampilkan dalam berbagai media dan pustaka diakses penulis berdasarkan pada studi kasus dan studi literatur pada jurnal nasional dan Internasional. Program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi Sosial (RTLH) adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018.

Tujuan program Rehabilitasi Sosial (RTLH) bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial serta menaikkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah sebagai rumah layak huni, sehat serta aman. Lokasi implementasi program RTLH adalah kelurahan yang ada di Kota Surabaya,

dengan memperhatikan usulan warga dan atau kelurahan yang disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, kondisi di lapangan dan ketersediaan anggaran. Pembiayaan Implementasi program RTLH Kota Surabaya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya. Secara umum, alokasi pembiayaan kegiatan program RTLH Kota Surabaya, menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kegiatan yang terkait program RTLH. Pemanfaatan alokasi dana dimanfaatkan untuk kegiatan yang berupa :

- a. Kegiatan Penyiapan dan penguatan UPKM. Kegiatan penyiapan dan penguatan lembaga UPKM, diwujudkan dalam bentuk forum musyawarah masyarakat, pembekalan teknis, penguatan kegiatan UPKM, fasilitas pembinaan akses pengembangan kegiatan masyarakat dengan institusi eksternal, khususnya dari dunia usaha dan industri.
- b. Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah. Kegiatan perbaikan lingkungan dan pembangunan rumah meliputi kegiatan pengadaan bahan bangunan dan mobilisasi tenaga kerja. Nilai cara yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah sesuai dengan tersedianya anggaran.
- c. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga dapat berupa kegiatan pelatihan, pemberian motivasi, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat. Nilai dan program yang diimplementasikan untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga sesuai dengan tersedianya kegiatan dan anggaran pada Pemerintah atau masyarakat.

Hasil analisis menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian (2000 : 142-150) yang terdiri atas lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Surabaya.

1. Stabilisator

Menurut Siagian (2000) Stabilisator dalam peran pemerintah artinya mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut bisa terwujud dengan menggunakan berbagai cara diantaranya: kemampuan selektif yang tinggi proses

sosialisasi yang elegan namun efektif, melalui edukasi, pendekatan yang *persuasive* serta pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Selaku *stabilisator*, pemerintahan merupakan *stabilisator* yang menjaga stabilitas nasional supaya tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik serta rencana-rencana program-program dan aktivitas-aktivitas operasional akan berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dari bentuk:

- a. Melakukan sosialisasi terkait nilai pagu anggaran, mekanisme, waktu, kuota dan tahapan pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi RTLH kota Surabaya.
- b. Membentuk tim pengawas dan melakukan pengawasan terhadap program rehabilitasi RTLH kota Surabaya setiap seminggu sekali.

Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam program RTLH Kota Surabaya menurut Kepala Desa beserta jajarannya yaitu dengan memberikan penjelasan berupa sosialisasi kegiatan di tingkat kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait nilai pagu anggaran, mekanisme, waktu, kuota dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Peserta sosialisasi terdiri dari Lurah, Pengurus UPKM, LPMK, RT/RW, calon penerima manfaat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dinas kota Surabaya bertanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi penerimaan program RTLH.

Bahwasanya proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam program RTLH Kota Surabaya perangkat desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan jejaring lainnya serta masyarakat bekerja sama. Selain itu Membuat kelompok penyuluhan oleh pemerintah untuk masyarakat desa, menciptakan komunikasi yang lancar dengan masyarakat. Hal yang disampaikan dalam sosialisasi program rehabilitasi RTLH kota Surabaya juga sama antar lain sosialisasi kerja dalam penerimaan manfaat program RTLH kota Surabaya dengan pola yang terarah dapat mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan penjelasan tentang apa itu program RTLH kota Surabaya dan siapa yang berhak menerima.

Untuk menjamin hasil akhir dari program rehabilitasi RTLH kota Surabaya sesuai atau tidak sesuai rencana awal yang diajukan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkoordinasi dengan instansi-instansi dari lingkungan pemkot Surabaya, diantaranya: BAPEDA, BPPT, BLH, PU Binamarga, PU Pengairan, dan Satpol PP Pembentukan tim ini dinamakan BP4D (Badan

Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman daerah), tim ini melakukan pengawasan terhadap program rehabilitasi RTLH kota Surabaya yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Tidak saja berfungsi agar mengetahui sejauh mana suatu program rehabilitasi RTLH kota Surabaya selaras dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi juga untuk membentuk penyesuaian-penyesuaian jikalau dibutuhkan, sesuai dengan apa yang terjadi pada lapangan. Menurut Saleh (1988: 2), dengan dilakukannya pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, serta dapat lebih mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang.

Koordinasi dalam pengawasan program rehabilitasi RTLH Kota Surabaya ini juga perlu dilakukan sebab koordinasi dimaksudkan buat mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih. Timbulnya koordinasi sendiri disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh Kaloh (2007:275), bahwa kompleksnya fungsi dan aktivitas yang secara khusus dilakukan oleh berbagai unit dan perorangan, bertambahnya spesialisasi memperbesar struktur organisasi itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan membandingkan apa yang sedang atau telah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Tujuan utama dengan adanya pembangunan rehabilitasi RTLH merupakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memiliki tempat tinggal yang lebih layak bagi penduduk miskin agar taraf hidup mereka lebih sejahtera, sehat, dan aman. Hal ini sejalan dengan penelitian Sholichah, dkk (2020) adanya program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya, dengan program tersebut para penerima bantuan merasakan manfaat yang didapat dari perbaikan rumah mereka tetapi hal tersebut belum bisa maksimal karena masih terdapat bagian rumah dari para penerima bantuan yang masih harus diselesaikan. Namun mereka merasa tenang sebab kondisi rumah mereka bebas dari atap yang bocor serta banjir karena mereka telah mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya.

2. Inovator

Sebagai *Inovator*, Inovasi merupakan salah satu dari hasil dari sebuah kreativitas. Penemuan baru merupakan bagi dari sebuah inovasi seperti temuan baru, metode baru, sistem baru dan juga pola pikir yang baru. Sifat "*problem-solving*" dan "*action-oriented*"

adalah pendekatan yang di perlukan dalam sistem, prosedur, dan metode kerja.

Menurut Siagian (2000), pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang wajib terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu mempunyai tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya sebab "menang" pada perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan awam yang tidak amanah serta tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya pada masyarakat. Tiga hal yang mutlak menerima perhatian serius yaitu, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, mekanisme serta metode kerja.

Pemerintah harus mampu menjadikan dirinya sebagai sumber ide atau gagasan baru. Aparatur pemerintah mempunyai dua fungsi yang paralel yaitu bahwa mereka bukanlah sekedar sebagai pelaksana dari kebijakan dalam program rehabilitasi RTLH kota Surabaya, tetapi juga penemu dan penerjemah ide setiap permasalahan termasuk dalam permasalahan program rehabilitasi RTLH kota Surabaya, sehingga sekaligus sebagai perumus kebijakan pembangunan yaitu:

- Inovasi sistem agar dapat menekan angka program rehabilitasi RTLH kota Surabaya
- Adanya Prosedur kerja dalam permasalahan program rehabilitasi RTLH kota Surabaya.

Inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah dalam program rehabilitasi RTLH kota Surabaya antara lain : Program Tahu Panas (tidak takut kehujanan dan tidak takut kepanasan). Program ini adalah program yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Bentuknya adalah perbaikan rumah tidak layak huni serta pembangunan jamban sehat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Penanganan program ini dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perbaikan fisik, lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat pada lingkungan perkampungan. Program tahu Panas pada prinsipnya telah berjalan dari tahun 2003 serta tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Pada Program Tahu Panas ini kegiatan yang dilakukan merupakan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban yang sehat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh dengan diintegrasikan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka inovasi yang ada di program Tahu Panas termasuk ke dalam tipologi inovasi konseptual. Hal ini disebabkan

inovasi yang dilakukan pada program Tahu Panas ditujukan buat melakukan perubahan pada cara pandang dari aktor yang terlibat sehingga lebih. Komprehensif dalam merampungkan permasalahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa program ini tidak semata-mata merubah pemukiman penduduk agar lebih sehat serta layak huni, namun juga merubah cara pandang pemerintah bahwa sehabis pemukiman kumuh diubah menjadi pemukiman yang sehat serta layak huni, masyarakat yang terdapat di dalamnya juga perlu diperhatikan taraf kesejahteraan ekonominya. Oleh karenanya, kemudian Pemerintah Daerah Kota Surabaya melaksanakan program pemberdayaan ekonomi agar penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Penduduk pada pemukiman kumuh dapat diselesaikan secara lebih komprehensif.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya benar-benar memperhatikan program rehabilitasi RTLH kota Surabaya dengan mencari solusi berupa inovasi yaitu Program Tahu Panas agar memberantas kemiskinan dan penduduk di pemukiman kumuh dapat diselesaikan secara lebih komprehensif. Sesuai dengan hasil penelitian Wichaksono (2018) yaitu terdapat tiga program inovatif di sektor publik pemerintah kota Surabaya (tinjauan reflektif terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota Surabaya tahun 2018), dimana salah satu program yang sukses dilakukan adalah program Tahu Panas berhasil menekan angka kemiskinan dari aspek rumah yang tidak layak huni memiliki alternatif solusi.

3. Modernisator

Menurut Siagian (2000), pada modernisator melalui pembangunan setiap negara pasti ingin menjadi negara kuat, mandiri, maka untuk mewujudkan pembangunan modernisator pada tiap negara diperlukan antara lain: ilmu pengetahuan yang cukup, kemampuan dan kehandalan manajerial, kemampuan mengolah sumber daya alam yang dimiliki sebagai nilai tambah yang tinggi, memiliki sistem pendidikan yang handal yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran yang produktif, dasar kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki arah tujuan yang jelas tentang masa depan sesuai yang diinginkan sehingga dapat terwujud dimasa depan. Selaku *Modernisator*, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan rakyat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara serta gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi

dengan tata cara kehidupan terkini. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Memiliki keahlian kompeten yang mengelolah program rehabilitasi RTLH kota Surabaya serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Pemberdayaan masyarakat penerima program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya supaya kedepannya dapat mandiri sehingga dapat mengatur dan mengelola.

Kemampuan pemerintah dalam manajemen dan mengelolah program rehabilitasi RTLH yaitu Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam pembuatan kebijakan dan juga orang-orang yang melaksanakannya sebab hal ini sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH di kota Surabaya. Kualitas manusia nya juga harus diperhatikan yaitu orang yang memiliki kompetensi berkaitan dengan rehabilitasi RTLH di kota Surabaya mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan pada proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat terhindarkan dari hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kerja sama yang hanya menguntungkan satu pihak. Secara kuantitas, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas pembangunan rehabilitasi RTLH harus memiliki pegawai yang cukup buat melaksanakan aktivitas tersebut. Sehingga apabila kegiatan dijalankan maka tidak terjadi kendala terhadap pekerjaan dilapangan nantinya.

Analisis mengenai program rehabilitasi RTLH berarti juga menilai kemampuan-kemampuan kekuasaan dari para aktor yang terlibat, kepentingan-kepentingan mereka dan strategi-strategi yang mereka tempuh buat mewujudkan kepentingan-kepentingann tersebut Program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya yaitu program yang memberikan pemberdayaan pada masyarakat. Sehingga para penerima program rehabilitasi RTLH diberikan kepercayaan penuh pada tiap kelompok agar mengatur dan mengelola sendiri kegiatan program tersebut. Sedangkan pihak instansi terkait seperti dinas sosial kota Surabaya dan pihak kecamatan, hanya memberikan arahan dan juga pengawasan. Namun nyatanya dilapangan masih ada campur tangan pemerintah khususnya berasal dari pihak kecamatan yang diluar tugas serta fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam juknislak. Hal tadi yg membuat pelaksanaan proses program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya terhambat sebab masih ada peran

pihak - pihak tertentu yang ingin mendominasi kegiatan ini . Hal yang hampir sama ditambahkan oleh masyarakat melalui penelitian Indayu (2012), yang mengatakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola kegiatan rehabilitasi RTLH di kota Surabaya di mulai dengan membuat peraturan yang tegas untuk serta mengajak dan bimbingan masyarakat untuk mengotimalkan pemberian program pemerintah melalui rehabilitasi RTLH di kota Surabaya. Namun beberapa masyarakat juga menilai pemerintah masih tidak mampu mengenal kelebihan-kelebihan masyarakat baik sumber daya manusia.

4. Pelopor

Pengertian kata pelopor dalam hal positif merupakan kepeloporan dalam bekerja seproduktif dan semaksimal mungkin , kepeloporan dalam menegakan suatu keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian dengan lingkungan, budaya dan sosial , dan kepeloporan dalam berkorban untuk kepentingan negara.

Menurut Siagian (2000), selaku pelopor bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat . Pelopor dalam bentuk hal- hal , positif agar dapat dicegah dalam rehabilitasi program RTLH. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Keadaan petugas yang ada dilokasi program RTLH kota Surabaya.
- b. Dukungan dari petugas dalam menangani kendala program RTLH kota Surabaya.

Peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan yaitu Pemerintah turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif disetiap proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya dan juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan pada masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan rehabilitasi RTLH di kota Surabaya sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya dan pemberdaya SDM agar berkualitas dan

memperbaiki kualitas hidup masyarakat untuk lebih baik dan layak. Sejalan dengan Penelitian Steinberg (2007), yaitu upaya pemerintah dalam proses rehabilitasi terhadap rekontruksi perumahan akibat gempa bumi di aceh dimaksudkan sebagai pondasi upaya pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat didaerahnya, dan menjadi ajang uji coba bagi penerapan pembangunan berbasis masyarakat secara masif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini (2013), yaitu secara keseluruhan pemerintah sebagai penyedia bentuk pelayanan terkait perbaikan daerah kumuh rumah tidak layak huni cukup membantu masyarakat untuk hidup yang lebih baik.

5. Pelaksana

Pelaksana merupakan pemegang tanggung jawab kegiatan pembangunan nasional dan bukan menjadi beban pemerintah saja , karena terdapat pertimbangan seperti keselamatan negara tersebut , terkendala modal, kemampuan yang masih belum memadai , karena kurang diminati oleh masyarakat serta karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin bila terdapat kegiatan yang tidak mampu diserahkan dipihak swasta melainkan harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri.

Menurut Siagian (2000), sebagai pelaksana pemerintah harus dapat memperhitungkan faktor - faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional . Mengendalikan faktor negatif yang dapat menjadi penghalang dalam pembangunan nasional sehingga dampaknya dapat diminimalkan, dan dapat mengetahui faktor -faktor yang bisa mendorong laju pembangunan nasional sehingga dapat menarik manfaat yang besar . Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Pemerintah menjalankan program rahabilitasi RTLH di kota Surabaya berlandaskan oleh standarisasi pembangunan perumahan , pengawasan , dan pengendalian pembangunan perumahan dan perbaikan kualitas perumahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemerintah memberikan contoh dengan turun langsung ke lokasi, menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif di setiap proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah kebijakan dari kementrian Sosial RI untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Untuk pelaksanaan program tersebut di tingkat kabupaten / kota telah dilakukan pembentukan Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten / Kota, yang dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Bupati /Walikota.

Walikota Surabaya nomor 6 tahun 2011 mengeluarkan peraturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibantu oleh dinas sosial kota Surabaya. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Surabaya meliputi pendataan, sosialisasi, penggerakan partisipasi masyarakat, penetapan calon penerima manfaat, memfasilitasi pembentukan kelompok, membentuk tim pelaksana teknis memberi fasilitasi pembukaan rekening untuk kelompok, persetujuan pencairan dana, monitoring pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan. Dan semuanya telah diatur dalam peraturan walikota Surabaya nomor 6 tahun 2019.

Kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni merupakan pengertian dari perumahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, penyelenggaraan perumahan dan pemukiman diselenggarakan berdasar -kan asas – asas sebagai berikut:

- 1) kesejahteraan;
- 2) keadilan dan pemerataan;
- 3) keterjangkauan dan kemudahan; serta
- 4) keserasian dan keseimbangan

Seperti yang diketahui bahwa papan (rumah) merupakan salah satu dari 3 (tiga) kebutuhan dasar manusia, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat terus dari tahun ketahun, bertambah pula kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan terdapat fakta beberapa tahun terakhir ini terdapat peningkatan pembangunan perumahan di kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduk kota Surabaya yang terus bertambah.

Pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, hal tersebut sesuai dengan salah satu ide pokok dalam pembangunan menurut siagian (2000). Maka perlu dilakukan peran pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang agar dapat melaksanakan pengawasan, standarisasi, dan penetapan regulasi dalam pembangunan perumahan.

Dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan fasilitas yang harus dipenuhi meliputi: akses jalan lingkungan, pembuangan

limbah, RTH, utilitas, dan fasilitas umum dan sosial lainnya. Hal tersebut mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman juga mengatur asas dalam penyelenggaraan perumahan kesejahteraan agar terciptanya keadilan dan pemerataan, serta keterjangkauan dan keserasaian.

Terjadi perubahan derajat kondisi rumah penerima bantuan program rehabilitasi RTLH terlihat perbedaaan yang signifikan, dimana rumah penerima bantuan sebelum adanya perbaikan dari program rehabilitasi RTLH masih dalam keadaan tidak layak huni karena dapat dilihat dari dinding yang masih menggunakan papan, atap rumah yang masih rumbia dan tidak ada MCK tetapi dengan bantuan program rehabilitasi RTLH mereka dapat tinggal dirumah dengan keadaan layak huni. Pembangunan program rehabilitasi RTLH sudah bejalan baik dan semua rumah sudah dibangun tegak, namun belum dapat dikatakan berhasil 100% karena ada bagian rumah yang belum dipasang. Jadi walaupun derajat perubahan juga telah tercapai tetapi tidak semua kelompok penerima bantuan dapat merasakan hal tersebut terjadi karena barang-barang yang dibutuhkan masih belum terkirim semuanya dan masih diurus oleh pihak pembeliannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin hasil akhir dari program rehabilitasi RTLH diperlukan peran pemerintah sebagai katalisator yang dapat memperhitungkan seluruh faktor yang dapat berpengaruh dalam pembangunan serta mengendalikan faktor yang dianggap negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dapat dampaknya dapat diminimalkan.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh walikota Surabaya dimulai dengan membuat strategi dan rencana kerja sesuai keputusan tim kerja dilapangan dan menyelaraskan pembangunan RTLH melalui upaya-upaya terhadap kebijakan dalam membangun masyarakat desa di era otonomi daerah kemudian melakukan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang adanya RTLH dikota Surabaya, serta infrastruktur. Selain itu pemberdayaan sumber daya manusia serta lingkungan hidup juga ditingkatkan. Proses pembangunan yang dilakukan walikota Surabaya dimulai dari mengikuti alur kerja berdasarkan peraturan walikota Surabaya nomor 6 tahun 2019 terus dilakukan secara bertahap. Hasil dari

penelitian Atmoko, dkk (2013) mewujudkan penetapan standarisasi pembangunan perumahan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan perbaikan kualitas merupakan peran pemerintah yang sudah baik dalam menciptakan perumahan yang layak huni. Sejalan dengan penelitian Nurjiansyah (2016), dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pemilihan penerima program dilakukan dengan musyawarah. Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) yang dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan di lingkungan kelurahan sehingga nantinya masyarakat yang dipilih untuk menjadi penerima bantuan program RSDK ini merupakan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dibantu atau penentuan dilakukan dengan melihat siapa yang paling mendesak atau membutuhkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan, analisis peran pemerintah dalam program rehabilitas sosial RTLH kota Surabaya menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian (2000 : 142-150, Secara umum, peran pemerintah telah berhasil melaksanakan program rehabilitas sosial RTLH kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat dari lima aspek. Pada kriteria stabilisator dapat dilihat dari program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya, penerima bantuan telah merasakan manfaat dari program rehabilitasi RTLH tetapi masih belum maksimal karena masih ada bagian rumah beberapa penerima bantuan yang belum diselesaikan. Namun mereka sedikit lebih tenang dan nyaman dengan kondisi rumah setelah ada perbaikan dengan mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan atap yang bocor dan banjir. Pada aspek Inovator yaitu inovasi sektor publik pada tiga program inovatif pemerintah daerah kota Surabaya (tinjauan reflektif terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota Surabaya tahun 2018), dimana salah satu program yang sukses dilakukan adalah program Tahu Panas berhasil menekan angka kemiskinan dari aspek rumah yang tidak layak huni memiliki alternatif solusi, yang merupakan bagian dari program sosial Rehabilitas RTLH.

Aspek modernisator yaitu peran pemerintah dalam manajemen dan mengelola Kegiatan rehabilitasi RTLH di kota Surabaya di mulai dengan membuat peraturan yang tegas untuk serta mengajak dan bimbingan masyarakat untuk mengotimalkan pemberian program pemerintah melalui rehabilitasi RTLH di kota Surabaya. Namun beberapa masyarakat juga menilai pemerintah masih tidak mampu mengenal kelebihan-kelebihan

masyarakat baik sumber daya manusia. Apek pelopor yaitu Pemerintah turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif disetiap proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya dan juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan pada masyarakat. Dan aspek pelaksana yaitu Pemerintah turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif disetiap proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya dan juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan pada masyarakat. Perlunya pendampingan kepada penerima layanan atas pembuatan proposal, optimalisasi kerja pelaksana program, pengendalian dan evaluasi agar dapat diperbaiki dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diberikan sehingga tujuan program dapat tercapai (Nafisa & Soesilowati, 2020)

Rekomendasi

1. Agar program berjalan berkelanjutan maka diperlukan penyuluhan ke masyarakat agar masyarakat paham akan dana bergulir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi jadi semua dilakukan berbasis sistem agar transparan dan akuntabilitas.
2. Dalam hal inovator pemerintah kota Surabaya pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dirasa kurang, kegiatan tersebut dapat dimaksimalkan melalui seminar, edukasi dan pelatihan agar penyelesaian masalah pada pemukiman kumuh dapat diselesaikan dengan maksimal. Sehingga kualitas hidup lebih baik tidak hanya diukur dari segi rumah yang sudah layak, tetapi kemampuan masyarakat yang berwawasan, pola pikir yang benar dapat menunjang kehidupan yang lebih baik lagi dan layak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan kepada peneliti dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Bapak Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si selaku dosen pembimbing artikel ilmiah.

3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji skripsi.
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A selaku dosen penguji skripsi.
5. Pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan secara moral dan finansial kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselasaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, R. P. 2013. Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Perumahan Layak Huni (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(4). 120-127.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Abidin, S.Z. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Suara Bebas.
- Adi, I.R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Andini, I. 2013. Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*. 1(1). 36-47.
- Steinberg, F. (2007). *Housing reconstruction and rehabilitation in Aceh and Nias, Indonesia—Rebuilding lives*. *Habitat International*. 31(1). 150-166.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Data jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia menurut Provinsi tahun 2018-2019. Jakarta : Badan Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2019. Data angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya tahun 2015 – 2019. Jakarta : Badan Statistik.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial. 2010. Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Kementerian Sosial RI.
- Fatwa, A. W. 2019. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga). *Jurnal Sosiologi Dialektika (JSD)*.
- Fauziah, F., & Esariti, L. 2020. Integrasi Gender Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program BSPS Kecamatan Semarang Utara (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). *Jurnal teknik PWK*.
- Heru Eriza. 2015. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Publika*. 3(7).
- Ishak, I., & Indayu, R. 2014. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Jamban/Sanitasi Kelurga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di Kecamatan Tebing Tahun 2012 (Doctoral dissertation, Riau University). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*.
- Kaloh, J, DR. 2007. *Mencari bentuk otonomi daerah*. Jakarta : Bineka Cipta.
- Miles, Matthew B, And Michael A. Huberman. 2012. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.
- Nurjiansyah, W. D. 2013. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*. 3(2). 169-4.
- Nafisa, R., & Soesilowati, E. 2020. *The Effectiveness of Rehabilitation Uninhabitable House Program Service. Economics Development Analysis Journal*. 9(1). 1-11.
- Peraturan Walikota Surabaya No.6 tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Kota Surabaya.
- Roebyantho, H. & Unayah, N. 2015. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*. 4(1). 311-330.
- Siagian, S.P. 2000. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulu, V., & Sholichah, N. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Warga Di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*. 4(1). 85-109.
- Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. 1(2). 196-205.